

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam sub bab ini peneliti melakukan Kajian tentang Respons China terhadap Laut Natuna Utara yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan persoalan China dengan Negara-Negara tetangga di sekitar Laut China Selatan khususnya Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Febri Arista (2021) dengan judul *Konflik Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Perairan Natuna Antara Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok*. Penelitian ini membahas terkait konflik yang terjadi di kawasan ZEE di perairan Natuna. Dengan kesimpulan yang menjelaskan terkait pengelolaan Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan Tiongkok yaitu dengan cara litigasi yang mana menggunakan pengadilan dalam permasalahan ini karena kedua Negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing ,dan Strategi pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan perbatasan wilayah sangat penting untuk mempertahankan Indonesia, karena jika dilakukan keduanya pasti akan berjalan seimbang. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dampak konflik wilayah ini terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan Tiongkok tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam berbagai bidang.

Penelitian yang dilakukan oleh Munmun Majumdar (2021), dengan judul penelitian *Beijing Raising The Ante In The Natunas: The Next Flash Point In The South China Sea?*, penelitian ini membahas terkait Klaim sembilan garis putus-

putus atau U-shape line China di Laut China Selatan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut Indonesia. Ada beberapa contoh di mana Jakarta dan China terlibat pertempuran yang melibatkan kapal penangkap ikan di wilayah Natuna. Perambahan terbaru oleh China ke ZEE Natuna Indonesia menjadi bukti pembenaran China untuk tindakan tersebut ketika berargumen bahwa China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha (Spratly) dan juga hak berdaulat atas perairan yang relevan di dekat Kepulauan Nansha. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Jakarta menolak kedua argumen tersebut dan bersikeras bahwa di bawah Konvensi PBB untuk Hukum Laut (UNCLOS), China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah penangkapan ikan tradisional atau bagian dari perairan Natuna dan menggunakan putusan Pengadilan Arbitrase PBB tahun 2016 untuk mendukungnya. posisi. Artikel ini mengkaji tanggapan Indonesia vis-à-vis China dan berpendapat bahwa dengan bangkitnya nasionalisme atas kepemilikan Natuna kemungkinan besar akan berkembang menjadi area potensi konflik antara Indonesia dan China.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sanisca Eka Pratiwi (2021) dengan judul penelitian China Mencoba Mengklaim Laut Natuna, penelitian ini membahas terkait Laut natuna yang terletak di kepulauan Riau, yang memiliki begitu banyak kekayaan alam, sehingga banyak Negara yang ingin mengklaim laut tersebut, salah satunya adalah Negara China. China memasuki daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mengatasnamakan Nine Dash Line atau 9 garis putus putus, sedangkan Indonesia sendiri tidak mengakui adanya Nine Dash Line. Perlakuan China ini sangat mengundang perhatian pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo turun langsung ke lokasi, hingga Presiden Republik Indonesia mengadakan kerjasama dengan Negara Jepang untuk mengusir kapal kapal illegal milik China. Bukan hanya presiden saja yang geram dengan ulah Negara China tersebut, anggota pemerintah lainnya, seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, hingga politikus DPR RI. Kementerian Luar Negeri juga begitu sangat keras dalam menyelesaikan permasalahan kapal asing di daerah Laut Natuna Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Amaliana Nur Fajrina (2020), Ali Roziqin, Iradat Taqwa Sihidi dengan judul penelitian *Geopolitical Studies Of The South China Sea: Data And Analysis Of Social Media*, penelitian ini membahas terkait Perebutan kekuasaan di wilayah Laut China Selatan telah menjadi isu penting untuk didiskusikan oleh khalayak umum. Beberapa Negara di ASEAN seperti Indonesia, serta pengaruh kekuatan Amerika dan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber daya yang melimpah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena geopolitik di wilayah Laut China Selatan dari perspektif masyarakat berdasarkan data dan analisis sosial media serta posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia pada isu Laut China Selatan tetap berpegang pada politik bebas aktif dan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku (UNCLOS 1982) dibuktikan dengan beberapa cuitan seperti menolak negosiasi dengan Beijing; menutup ruang negosiasi; dan menolak 9 garis putus-putus yang diklaim oleh China. Isu konflik Laut China Selatan ini lebih banyak dibicarakan dari kalangan Baby Boomers dan hanya sedikit dari gen X-Y. Implikasi studi menjelaskan bahwa Indonesia sangat menekankan upaya diplomasi dalam isu geopolitik yang tengah memanas di Laut China Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Totok Imam Santoso (Biro Humas Settama Lemhannas RI, 2020) dengan judul penelitian *Aksi Agresivitas China Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI*, penelitian ini membahas terkait Konflik Laut China Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara China, dan Negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara. China sebagai salah satu claimant state merupakan great power yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun China sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi aksi agresif China di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer China menjadi

konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif China; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi nasional di ZEEI. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan peningkatan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus pembahasan yang berbeda di setiap penelitian dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penelitian pertama memfokuskan pembahasan pada aspek Diplomasi yang dilakukan oleh China dengan Indonesia dalam hubungan kerjasama.
- b. Penelitian kedua memfokuskan pembahasan pada potensi aspek hukum di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan.
- c. Penelitian ketiga memfokuskan pembahasan pada Respons pemerintah Indonesia di berbagai instansi terkait dengan klaim Laut Natuna Utara.
- d. Penelitian keempat memfokuskan pembahasan kepada Pemerintah Indonesia yang tetap mengedepankan politik bebas aktif dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara.
- e. Penelitian kelima memfokuskan pembahasan pada Perspektif dan tugas TNI dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara.
- f. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada penekanan terhadap respons China terhadap kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih mengedepankan aspek diplomasi dan Hubungan Bilateral.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Politik Luar Negeri

Pada dasarnya penjelasan terkait arti dan definisi dari konsep politik luar negeri hampir tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut, sebab setiap penelitian yang dilakukan melalui kajian-kajian ilmiah dapat memberikan definisi yang berbeda yang didasari dengan analisis-analisis lebih lanjut yang memberikan gambaran terkait definisi dari politik luar negeri (Dharmaputra 2013: 1).

Menurut James Rosenau (1987) sebuah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah secara otoritatif menurutnya adalah definisi dasar dari politik luar negeri, dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang matang. Dharmaputra (2013) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa menurut Wilkenfeld (1980) politik luar negeri adalah aksi atau reaksi yang dikeluarkan oleh Negara yang berdaulat, yang dimana Respons tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi atau merubah suatu kondisi yang berkaitan dengan batas-batas teritorial Negara tersebut.

Pendapat yang dijelaskan oleh (Modelski 1962: 6) yaitu bahwa politik luar negeri tidak selalu berkaitan dengan hubungan antar Negara. Namun politik luar negeri juga dapat dilihat dari suatu kesatuan sistem atas aktivitas tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengubah kondisi atau perilaku Negara lain dan dapat dilihat dalam bentuk penyesuaian terhadap suatu kondisi di lingkungan eksternal. Modelski juga memberikan gambaran mengenai politik luar negeri sebagai reaksi atau Respons baik dengan tujuan maupun tidak terhadap suatu kondisi atau situasi lingkungan eksternal.

Secara umum pengertian dari politik luar negeri adalah sebuah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu Negara untuk menjalin hubungan dengan Negara lain dan bertujuan untuk mencapai kepentingan eksternal atau nasional dari Negara tersebut yang di mana politik luar negeri juga digunakan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan yang akan diberikan kepada pihak lain dari suatu Negara atau mengambil tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintah lainnya (Abidin, 2019)

Strategi yang dimiliki oleh suatu Negara dalam berhubungan dengan Negara lain juga dapat diartikan sebagai politik luar negeri dengan tetap berdasarkan nilai, arah, respons dan tujuan untuk mempertahankan,

mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dari suatu Negara di dalam dunia internasional. oleh sebab itu, setiap pemerintah suatu Negara memiliki sebuah kebijakan dan strategi terkait politik luar negeri yang bergantung atau mendasar kepada tujuan nasional dari setiap Negara tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu Negara yaitu faktor dalam negeri atau internal dan faktor luar negeri atau eksternal. faktor-faktor tersebut merupakan bentuk implementasi dari aspirasi seluruh rakyat dari sebuah Negara yang memiliki kepentingan dan harus diperjuangkan oleh pemerintah di hadapan dunia internasional.

Tujuan utama teori kebijakan luar negeri adalah untuk memahami dan menjelaskan kebijakan dan tindakan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Teori kebijakan luar negeri berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk kepentingan nasional, nilai-nilai, dan politik dalam negeri, serta konteks internasional yang lebih luas di mana ia beroperasi.

Teori kebijakan luar negeri juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi tentang bagaimana negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka, apakah itu ekonomi, terkait keamanan, atau terkait dengan masalah lain. Beberapa teori kebijakan luar negeri, seperti realisme dan liberalisme, menawarkan resep bagaimana negara harus berperilaku untuk mencapai tujuan mereka dan mempertahankan sistem internasional yang stabil. Teori-teori lain, seperti konstruktivisme dan Marxisme, lebih menekankan pada pemahaman faktor-faktor mendasar yang membentuk kebijakan luar negeri dan bagaimana faktor-faktor ini dapat diubah untuk mempromosikan hubungan internasional yang lebih kooperatif dan adil (Holsti, 2006).

Secara keseluruhan, tujuan dari teori kebijakan luar negeri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang membentuk hubungan internasional dan untuk menawarkan panduan bagaimana negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka dalam lingkungan global yang berubah dan seringkali kompleks.

Tujuan utama teori kebijakan luar negeri adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan negara lain. Dengan mengembangkan dan menguji berbagai teori, sarjana dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang motivasi, pendorong, dan konsekuensi keputusan kebijakan luar negeri, dan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan mengantisipasi tindakan negara lain. Beberapa tujuan khusus dari teori kebijakan luar negeri dapat meliputi (Kaarbo, 2010):

1. Menjelaskan motivasi di balik keputusan kebijakan luar negeri: Teori kebijakan luar negeri dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam isu-isu seperti perdagangan, diplomasi, pertahanan, dan bidang hubungan internasional lainnya. Ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami pendorong yang mendasari keputusan kebijakan luar negeri dan mengantisipasi tindakan negara lain.
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis keputusan kebijakan luar negeri: Teori kebijakan luar negeri dapat memberikan seperangkat alat analisis dan konsep yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi implikasi dari pilihan kebijakan yang berbeda.
3. Mengidentifikasi pola dan tren dalam kebijakan luar negeri: Dengan memeriksa kebijakan dan tindakan berbagai negara dari waktu ke waktu, teori kebijakan luar negeri dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren perilaku kebijakan luar negeri, yang dapat menginformasikan perkembangan keputusan kebijakan di masa depan.
4. Menawarkan wawasan tentang peran lembaga internasional: Banyak teori kebijakan luar negeri juga mempertimbangkan peran lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional, dalam membentuk kebijakan luar negeri. Teori-teori ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami pengaruh lembaga-lembaga ini terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

5. Menasihati pembuat kebijakan tentang tindakan terbaik: Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri, teori kebijakan luar negeri dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui seorang pakar ilmu politik, Riza Sihbudi, mendefinisikan politik luar negeri sebagai sebuah perpanjangan tangan dari politik dalam negeri suatu Negara. dengan kata lain politik luar negeri adalah sebuah kebijakan politik yang memiliki hubungan dan tujuan untuk pembangunan internal suatu Negara (Sihbudi, 2016)

Menurut Abidin (2019) terdapat beberapa pendekatan konseptual dalam menganalisis politik luar negeri, antara lain:

1. Pendekatan pemikiran strategis suatu Negara

Pendekatan pemikiran strategis atau dapat disebut juga dengan pendekatan adaptif yang dicetuskan oleh James N. Rosenau. yaitu merupakan sebuah teoritisasi dari pendekatan yang memberikan pandangan bahwa sebuah lingkungan akan menciptakan sebab dan akibat khusus, terlepas dari apa yang dilakukan oleh Negara tersebut, pendekatan ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem interaksi antar Negara dengan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya.

Setiap Negara memiliki kondisi politik luar negeri yang berbeda-beda berdasarkan lingkungan eksternalnya. Sebuah Negara yang terletak di antara dua benua tentunya yang memiliki politik luar negeri yang berbeda dengan Negara yang terletak di antara dua Negara. hal lain yang mempengaruhi politik luar negeri yaitu keadaan geografis, lokasi dan luas wilayah suatu Negara.

2. Pendekatan konsep tingkat analisis (Levels of analysis)

Pendekatan konsep tingkat analisis ini digunakan oleh Salah satu tokoh yaitu Bary Buzan. Menurut Bary Buzan, dalam menganalisis politik luar negeri suatu Negara tidak cukup hanya mempertimbangkan kondisi nasionalnya saja akan tetapi ia membagi beberapa level tingkatan dalam pendekatan konsep tingkat analisis, yang di mana level tersebut berfungsi sebagai sebuah tahapan dalam

hubungan politik luar negeri, yaitu level internasional, level regional, level Negara, level sub Negara dan level individu.

3. Pendekatan “rings of power “ atau lingkaran kekuasaan

Pendekatan rings of power atau lingkaran kekuasaan menganggap bahwa sebuah politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan negaranya, pendekatan ini berasumsi bahwa politik luar negeri adalah sebuah lingkaran kekuasaan di dalam dunia internasional antara negara satu dengan negara lainnya.

Politik luar negeri yang dilakukan di dalam pendekatan ini digunakan untuk dapat mencapai tujuan (*power*). Salah satu tokoh yang menjadi pemikir dari pendekatan ini adalah Allison (*Fractionated Power*). Allison berasumsi bahwa dalam menjalankan politik luar negeri, suatu negara harus memiliki power dan berada di tengah-tengah power negara lain sehingga dengan adanya kekuatan atau kekuasaan tersebut maka tujuan dari politik luar negeri suatu negara dapat dicapai.

4. Pendekatan formulasi akhir dan implementasi

Model yang digunakan pada pendekatan formulasi akhir dan implementasi ini adalah pengambilan keputusan atau decision making, hasil akhir dari sebuah proses politik luar negeri adalah terciptanya sebuah keputusan atau kebijakan yang menjadi sebuah respons suatu negara atas lingkungan internasional.

Richard Snyder adalah tokoh yang menganalisis pendekatan ini, Richard menyatakan bahwa hasil dari politik luar negeri adalah sekumpulan keputusan-keputusan yang diputuskan oleh unit-unit politik suatu negara atau yang biasa disebut elit-elit politik, menurutnya unit politik tersebut adalah aktor utama yang menciptakan sebuah kebijakan atas politik luar negeri tersebut.

Poin penting dari pendekatan ini adalah serangkaian struktur yang tercipta dari sebuah proses politik luar negeri sehingga mencapai suatu kebijakan atau pengambilan keputusan.

Elit politik yang kita sebut sebagai pembuat keputusan tentu akan melakukan sejumlah kajian atau analisis terkait faktor-faktor yang berkaitan dengan politik luar negeri seperti jaringan informasi, pengaruh politik luar negeri dan situasi kondisi dalam menjalankan politik luar negeri. maka hasil dari analisis

tersebut adalah terciptanya sebuah kebijakan untuk menjalankan politik luar negeri.

5. Pendekatan rasionalitas dan rintangannya

Pendekatan rasionalitas dan rintangannya menekankan bahwa agar suatu negara yang di mana negara tersebut adalah aktor utama dan ingin mencapai tujuan nasional mereka dengan memperhitungkan segala aspek secara rasional di dalam politik internasional. William D. Coplin adalah salah satu tokoh yang menggunakan analisis pendekatan ini.

Dalam pendekatan ini William membagi proses tersebut menjadi empat langkah sebelum dilakukannya sebuah pendekatan yang rasional yaitu, pertama, mendefinisikan situasi yang terjadi di lingkungan internasional. kedua, memilih tujuan dari politik luar negeri. ketiga, negara harus menentukan alternatif lain untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan dan situasi. keempat, memilih alternatif atas tindakan dari berbagai macam alternatif yang ada.

Respons yang diberikan oleh suatu negara atas tindakan dari negara lain merupakan konsep politik luar negeri dari pendekatan rasionalitas, pendekatan ini cenderung menganalisis setiap Respons yang diberikan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional.

Rasional yang dimaksud pada pendekatan ini adalah proses analisis dan menghitung setiap alternatif yang ada dan menghasilkan alternatif yang baik untuk dijadikan sebagai Respons dalam politik luar negeri.

Teori kebijakan luar negeri dapat diterapkan pada konflik teritorial dalam beberapa cara. Realisme: Menurut realisme, negara dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri dan berupaya memaksimalkan kekuatan dan keamanan mereka. Dalam konteks konflik teritorial, suatu negara dapat menempuh kebijakan perluasan teritorial atau menegaskan kedaulatannya atas suatu wilayah yang disengketakan untuk meningkatkan kekuatan dan keamanannya.

Liberalisme: Liberalisme menekankan pentingnya lembaga internasional dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks konflik teritorial, suatu negara dapat berupaya untuk bekerja melalui organisasi internasional seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi regional untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.

Konstruktivisme: Konstruktivisme berfokus pada peran gagasan, norma, dan identitas dalam membentuk kebijakan luar negeri. Dalam konteks konflik teritorial, sebuah negara mungkin berusaha untuk menarik nilai-nilai atau identitas bersama untuk membangun dukungan bagi posisinya atau untuk membenarkan tindakannya.

Pendekatan lain: Ada banyak pendekatan lain untuk kebijakan luar negeri yang dapat diterapkan pada konflik teritorial, termasuk konstruktivisme, Marxisme, feminisme, dan lain-lain. Setiap pendekatan menawarkan wawasan yang berbeda tentang bagaimana negara dapat bertindak dalam konteks sengketa teritorial, dan bagaimana sengketa tersebut dapat diselesaikan.

Beberapa contoh pemikir kebijakan luar negeri terkemuka meliputi:

1. Hans Morgenthau: Morgenthau adalah seorang ilmuwan politik Jerman-Amerika yang dianggap sebagai salah satu pendiri disiplin hubungan internasional. Dia terkenal karena teori realismenya, yang menekankan peran kekuasaan dan kepentingan nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri.
2. John Mearsheimer: Mearsheimer adalah seorang ilmuwan politik Amerika dan sarjana hubungan internasional yang dikenal atas kontribusinya dalam studi keamanan internasional dan kebijakan luar negeri. Dia adalah pendukung utama teori realisme ofensif, yang berpendapat bahwa negara dimotivasi oleh kepentingan diri mereka sendiri dan akan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka sendiri.
3. Joseph Nye: Nye adalah seorang ilmuwan politik dan diplomat Amerika yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Dia dikenal karena karyanya tentang konsep "soft power", yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakannya daripada melalui paksaan militer atau ekonomi.

4. John Ikenberry: Ikenberry adalah seorang ilmuwan politik Amerika dan sarjana hubungan internasional yang dikenal karena karyanya tentang peran lembaga internasional dan demokrasi dalam membentuk kebijakan luar negeri. Dia adalah penganjur terkemuka teori liberalisme, yang menekankan pentingnya kerja sama, demokrasi, dan supremasi hukum dalam hubungan internasional.

Ada banyak pemikir kebijakan luar negeri lainnya yang telah memberikan kontribusi penting di bidang ini, dan gagasan serta wawasan mereka terus membentuk cara kita memikirkan dan memahami kebijakan luar negeri.

2.2.2 Teori Geopolitik

Menurut Karl Haushofer (1896), Teori Geopolitik ini ia sebut juga sebagai Teori Ekspansionisme. Karl dalam teorinya mengajarkan bahwa geopolitik adalah bentuk lain dari politik geografi yang mengedepankan sektor strategi perbatasan, faktor ekonomi dan sosial sebagai bagian dari kekayaan suatu negara. Dalam hal ini strategi perbatasan yang digunakan China untuk mendeklarasikan wilayah teritorialnya yaitu dengan peta *Nine Dash Line*.

Geopolitik merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang suatu hubungan geografi, strategi, dan politik suatu negara. geografi merupakan salah satu faktor penting dalam teori geopolitik yang di mana faktor geografi tersebut memiliki pengaruh atas perilaku dan respons suatu Negara (Suradinata, 2021) (Prabowo, 2017).

Geopolitik juga menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan sebuah kebijakan strategi pertahanan. Pada pemetaan geopolitik terdapat beberapa poin yang menjadi aspek penting dalam pembentukan strategi yaitu adalah politik, militer, ekonomi, sosial, infrastruktur, informasi, dan teknologi. Poin tersebut adalah aspek-aspek yang saling berhubungan dan membuat suatu kesatuan kekuatan dalam suatu negara (Santoso, 2021: 1).

Keterkaitan geopolitik terhadap suatu konflik kawasan yang dapat menjadi landasan untuk melakukan suatu pembenaran Terhadap konflik tersebut yaitu adalah hukum internasional. Hal ini dapat kita lihat dalam konflik yang terjadi di kawasan laut China Selatan bahwa Indonesia memiliki hak atas perairan Natuna

yang mendasar pada UNCLOS 1982. *International Government Organization* (IGO) dan *Non Government Organization* (NGO) sebagai Organisasi Internasional di luar dari aktor pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam strategi geopolitik. dalam konflik kawasan laut China Selatan kita melihat bahwa terdapat *International Government Organization* (IGO) yang berperan aktif di negara-negara kawasan konflik yaitu adalah *Association Of The Southeast Asian Nation* (ASEAN).

Menurut Soekarno, Geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu berhubungan dengan geografische constellatie sesuatu negeri (Pamungkas, 2017) . Teori Geopolitik jika kita melihat dari perspektif institusional, geopolitik memiliki peran yang cukup lemah jika dikatakan sebagai sub disiplin ilmu. dalam pembentukan negara yang di mana politik merupakan suatu hal yang dominan geopolitik berperan sebagai pemikiran dan praktik (Priyono, 2017).

Dalam konsep Geopolitik setiap Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu Negara melibatkan Geostrategi. Strategi yang digunakan untuk membentuk sebuah kebijakan yang berkaitan dengan konflik kawasan tentunya akan memperhatikan aspek geografi. Geostrategi sendiri merupakan cabang dari geopolitik. Ketika sebuah negara memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik dalam mengimplementasikan geopolitik maka aktor negara tersebut akan memiliki perhitungan dan analisis yang matang terkait kebijakan yang akan diambil (Soepandji, 2019)

Dalam kajian Hubungan Internasional analisis terkait dinamika isu yang terjadi dalam politik internasional memiliki berbagai macam pendekatan. Pendekatan realisme klasik adalah pendekatan yang umum digunakan pasca perang dingin, dengan tema *struggle for power and security*. dalam pendekatan ini kekerasan dan anarki adalah cara yang umum digunakan untuk mencapai kepentingan suatu Negara, dan super power adalah alat utama untuk mencapai *National Interest* (kepentingan Nasional) menurut Morgenthau.

Dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* dituliskan bahwa hubungan resmi antar pemerintah dengan Negara Negara berdaulat yang mengandalkan

taktik dan penerapan kepandaian disebut juga sebagai diplomasi (Sir Ernest Satow. 1995. Hlm 2). Sedangkan menurut Hasyim Djalal (1990) diplomasi ialah mendukung pandangan kita dengan memahami, membenarkan dan meyakinkan pihak lain atau Negara lain tanpa adanya kekerasan. Namun ketika cara-cara damai dalam diplomasi telah gagal bagi suatu Negara untuk mencapai kepentingannya, sehingga munculah pemikiran dimana kekerasan menjadi alternatif untuk mencapai kepentingan tersebut.

Terdapat beberapa definisi yang terlihat jelas dalam sebuah diplomasi menurut S.L Roy, yaitu:

1. Negosiasi sebagai suatu unsur yang pokok dalam diplomasi ‘
2. Mengedepankan kepentingan Negara
3. Pencapaian sebuah kepentingan suatu Negara dengan damai dan tanpa merusak kepentingan nasional itu sendiri.
4. Negosiasi yang dilakukan untuk melakukan sebuah persiapan perang pada hakikatnya bukan untuk mencapai perdamaian.
5. Mempererat hubungan politik suatu Negara dengan Negara lainnya
6. Hubungan sistem Negara yang erat dengan diplomasi modern
7. Diplomasi dan perwakilan Negara adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (S.L.Roy. 1995. Hlm 4)

Setiap Negara memiliki keinginan untuk mencapai kebebasan politik dan Integritas teritorial, hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari sebuah diplomasi, dengan menjamin semua keuntungan maximum bagi Negara dan pemeliharaan keamanan (Kautilya). Pada akhirnya suatu Negara harus memberikan kompromi memberi dan menerima setiap kepentingan Negara lain yang dipertemukan.

Klaim historis China Terkait *nine dash line* terkait laut Natuna merupakan sebuah pelanggaran apabila kita mengacu pada Convention on the law of sea (UNCLOS) pada tahun 1982 yang memberikan banyak dampak terhadap kemaritiman dunia. Sebuah konstitusi laut yang memberikan aturan dan rangka yang detail terkait kepemilikan dalam teritorial laut. Hal hal yang diatur dalam UNCLOS yaitu;

1. Hak navigasi
2. Pelestarian lingkungan laut
3. Pemanfaatan sumberdaya
4. Otoritas ekonomi laut
5. dan isu-isu terkait kemaritiman

Teritorial atas kawasan laut diatur dalam UNCLOS part V (bagian lima), PBB bersama dengan UNCLOS menetapkan bahwa laut China selatan adalah kawasan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia. Maka dari itu sembilan garis putus atau *nine dash line* yang diklaim China berbanding terbalik dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional. Disatu sisi bahwa Negara China juga merupakan salah satu Negara yang memvalidasi terkait adanya hukum laut internasional itu sendiri. (Hafidz, A. M., 2017. Hal. 3).

Teori geopolitik adalah bidang studi yang mengkaji hubungan antara geografi, politik, dan kekuasaan. Ini berkaitan dengan cara-cara geografi, khususnya karakteristik fisik suatu wilayah, dapat membentuk dan mempengaruhi sistem politik dan ekonomi, serta tindakan dan strategi negara dan aktor lainnya.

Teori geopolitik mengacu pada berbagai disiplin ilmu, termasuk geografi, ilmu politik, ekonomi, sejarah, dan hubungan internasional, untuk memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ini. Ini dapat berfokus pada geografi fisik suatu wilayah, seperti sumber daya alamnya, jalur transportasi, dan fitur geografis, serta sistem politik dan ekonomi yang telah berkembang di dalamnya.

Salah satu aspek kunci dari teori geopolitik adalah konsep kepentingan strategis, atau nilai yang dimiliki oleh lokasi atau wilayah tertentu bagi negara atau aktor lain dalam kaitannya dengan potensi dampaknya terhadap kepentingan dan tujuan mereka. Hal ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti keberadaan sumber daya alam, akses jalur perdagangan, atau nilai strategis militer.

Teori geopolitik sering digunakan untuk memahami motivasi dan tindakan negara dan aktor lain dalam hubungan internasional, dan untuk memprediksi hasil potensial dari konflik atau interaksi lain di antara mereka. Ini juga dapat

digunakan untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ada banyak pemikir berpengaruh di bidang teori geopolitik sepanjang sejarah. Beberapa yang paling terkenal termasuk:

1. Halford Mackinder: Seorang ahli geografi dan politikus Inggris, Mackinder dianggap sebagai salah satu pendiri geopolitik modern. Dia terkenal karena konsepnya tentang "Heartland Theory", yang berpendapat bahwa kendali wilayah tengah Eurasia, yang dikenal sebagai "Heartland", adalah kunci dominasi global (Mackinder, 1904).
2. Nicholas Spykman: Seorang ilmuwan politik Belanda-Amerika, Spykman mengembangkan konsep "Rimland", atau wilayah luar yang mengelilingi Heartland. Dia berargumen bahwa kontrol atas Rimland sangat penting untuk mengamankan dominasi global, karena berisi mayoritas populasi dunia dan sumber daya ekonomi (Spykman, 1944)
3. Karl Haushofer: Seorang jenderal dan ahli geopolitik Jerman, Haushofer adalah tokoh terkemuka dalam pengembangan geopolitik Nazi. Dia percaya bahwa penguasaan wilayah dan sumber daya sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan suatu negara, dan mengadvokasi perluasan wilayah Jerman melalui penaklukan militer (Haushofer, 1942).
4. Edward Luttwak: Seorang ilmuwan politik dan ahli strategi militer Amerika, Luttwak dikenal dengan konsepnya tentang "kalkulus strategis", yang menekankan peran geografi dan sumber daya alam dalam membentuk strategi militer.
5. Robert Kaplan: Seorang jurnalis Amerika dan analis kebijakan luar negeri, Kaplan adalah pemikir kontemporer terkemuka di bidang geopolitik. Dia telah banyak menulis tentang peran geografi dan sumber daya alam dalam membentuk politik global dan menganjurkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang peran geografi dalam hubungan internasional (Kaplan, 2012),

Banyak cendekiawan dan pemikir lainnya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara geografi, politik,

dan kekuasaan. Ada beberapa cara di mana konsep teori geopolitik dapat diterapkan pada analisis dan pemahaman konflik teritorial.

Menganalisis nilai strategis wilayah yang disengketakan: Salah satu aspek kunci dari teori geopolitik adalah konsep kepentingan strategis, atau nilai yang dimiliki lokasi atau wilayah tertentu bagi negara atau aktor lain dalam hal dampak potensialnya terhadap kepentingan dan tujuan mereka. Dalam kasus konflik teritorial, menganalisis nilai strategis wilayah yang disengketakan dapat membantu memahami motivasi dan tujuan pihak-pihak yang terlibat. (Juniawan, 2017)

Meneliti geografi fisik suatu wilayah: Geografi fisik suatu wilayah, termasuk sumber daya alamnya, jalur transportasi, dan fitur geografisnya, dapat berdampak signifikan pada perkembangan dan stabilitas suatu negara atau wilayah. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan tentang konsekuensi potensial dari sengketa teritorial.

Menilai sistem politik dan ekonomi pihak-pihak yang terlibat: Sistem politik dan ekonomi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik teritorial juga dapat membentuk dan mempengaruhi tindakan dan strategi mereka. Meneliti sistem ini dapat memberikan wawasan tentang hasil potensial dari konflik dan membantu menginformasikan keputusan kebijakan.

Menganalisis konteks historis sengketa: Konteks historis juga dapat memainkan peran penting dalam konflik teritorial, karena peristiwa dan pengalaman masa lalu dapat membentuk persepsi dan motivasi pihak-pihak yang terlibat. Meneliti konteks historis dari sengketa teritorial dapat memberikan wawasan tentang akar penyebab konflik dan menginformasikan upaya untuk menyelesaikannya.

Secara keseluruhan, konsep teori geopolitik dapat bermanfaat dalam membantu memahami faktor-faktor kompleks yang membentuk dan mempengaruhi konflik teritorial, serta menginformasikan upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut.

Merujuk pendapat Neklessa yang dikutip dari Priyono & Yusgiantoro (2017), geoekonomi menguji lima subjek: imperatif geografis (geographical imperative),

kekuasaan dan instrumen yang sebenarnya, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing suatu negara di era globalisasi, lokalisasi spasial dalam alam semesta global yang baru dan berbeda jenis kegiatan ekonominya, serta pembentukan interaksi strategis dan dasar pemerintahan global. Empat dari lima bidang subjek geoekonomi dari Neklessa berbicara Bahasa geografis.(Lachininskii, 2012)

Geopolitik adalah bidang studi yang mengkaji hubungan antara geografi, politik, dan kekuasaan, dan terus menjadi konsep yang relevan dan berpengaruh di zaman modern. Beberapa cara di mana prinsip-prinsip geopolitik diterapkan di zaman modern meliputi (Flint, 2011):

1. Hubungan internasional: Geopolitik sering digunakan untuk memahami motivasi dan tindakan negara dan aktor lain dalam hubungan internasional, dan untuk memprediksi hasil potensial dari konflik atau interaksi lain di antara mereka. Ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Strategi militer: Prinsip-prinsip geopolitik dapat diterapkan pada strategi militer, khususnya dalam analisis nilai strategis wilayah dan peran geografi dalam membentuk operasi militer.
3. Manajemen sumber daya: Geopolitik juga relevan dalam pengelolaan sumber daya alam, karena distribusi dan kontrol sumber daya ini dapat berdampak signifikan pada politik dan ekonomi global.
4. Strategi bisnis dan ekonomi: Prinsip-prinsip geopolitik juga dapat diterapkan dalam pengembangan strategi bisnis dan ekonomi, khususnya dalam analisis nilai strategis berbagai lokasi dan potensi dampak perubahan politik dan ekonomi global.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip geopolitik tetap relevan dan berpengaruh di zaman modern, dan diterapkan dalam berbagai konteks untuk lebih memahami dan mengarahkan interaksi kompleks antara geografi, politik, dan kekuasaan.

Saat ini, popularitas geopolitik naik daun menjadi sarana penggambaran dan pertarungan konflik kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara baru untuk